



# Public Private Partnership dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Mrican Kabupaten Ponorogo

Dhea Ayu Puspita Dewi<sup>1</sup>, Diana Hertati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [dheadewi32@gmail.com](mailto:dheadewi32@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-05-13 Revised: 2025-06-23 Published: 2025-07-09	Waste management remains a major challenge in sustainable development, particularly in densely populated areas such as Ponorogo Regency, East Java. Limited infrastructure, human resources, and landfill capacity hinder the effectiveness of existing waste management systems. This study aims to analyze the implementation of a Public Private Partnership (PPP) scheme between the Ponorogo Regency Government and private sector at the Mrican Landfill, using a descriptive qualitative approach. The theoretical framework adopts the <i>hollow state</i> model by Provan and Milward, focusing on three key dimensions: cooperation mechanisms, institutional structure, and incentive systems. The findings reveal that although the partnership is formally established through a Memorandum of Understanding (MoU) and regional regulations, technical and coordination barriers persist. The analysis of financing, actor roles, and tipping fee incentives indicates that cross-sector integration is not yet optimal. Nevertheless, the PPP model presents promising opportunities if supported by participatory evaluation, capacity building, and technological innovation. This study provides policy recommendations to enhance the effectiveness and sustainability of decentralized PPP-based waste management collaborations.
<b>Keywords:</b> <i>Learning Media;</i> <i>Capcut Media;</i> <i>Learning Motivation;</i> <i>Economics.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-05-13 Direvisi: 2025-06-23 Dipublikasi: 2025-07-09	Pengelolaan sampah merupakan tantangan signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kabupaten Ponorogo. Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi hambatan utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi skema Public Private Partnership (PPP) antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pihak swasta di TPA Mrican, menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep <i>hollow state</i> dari Provan dan Milward, yang menekankan tiga dimensi utama: mekanisme kerja sama, struktur kelembagaan, dan insentif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah terbentuk secara formal melalui MoU dan kerangka regulatif daerah, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan koordinatif. Evaluasi terhadap pembiayaan, struktur aktor, dan pemberian insentif tipping fee menunjukkan bahwa integrasi lintas sektor belum optimal. Namun, model PPP ini tetap potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dengan memperkuat evaluasi partisipatif, pelatihan SDM, dan inovasi teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan kerja sama pengelolaan sampah berbasis PPP di tingkat daerah.
<b>Kata kunci:</b> <i>Media Pembelajaran;</i> <i>Media Capcut;</i> <i>Motivasi Belajar;</i> <i>Ekonomi.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Sampah telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat global, tetapi juga secara khusus di daerah-daerah dengan populasi padat dan sistem tata kelola lingkungan yang masih terbatas. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 277,7 juta jiwa pada Juli 2023 (Annur, 2023), menghadapi tekanan besar terhadap ketersediaan lahan, air bersih, dan kualitas lingkungan akibat peningkatan produksi limbah. Ketika pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan pengelolaan sumber daya dan sistem infrastruktur

lingkungan, maka salah satu dampak yang paling cepat terlihat adalah penumpukan sampah.

Permasalahan sampah tidak hanya sebatas persoalan teknis pengumpulan dan pembuangan akhir. Ia juga mencerminkan sistem sosial dan politik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan urbanisasi dan industrialisasi. Dalam konteks ini, volume timbulan sampah meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi. Seperti di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dari 871.370 jiwa pada 2019 menjadi 972.582 jiwa pada 2023 (Badan Pusat Statistik Jawa Timur,

2023), menyebabkan tekanan terhadap TPA Mrican yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir di kabupaten tersebut.

Sesuai data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2022), Kabupaten Ponorogo menghasilkan sekitar 382,34 ton sampah per hari atau lebih dari 139 ribu ton per tahun. Jumlah ini sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga (72,33%), yang sulit terurai jika tidak dipilah sejak awal. TPA Mrican hanya memiliki luas 1,8 hektare, jauh di bawah standar minimal 4 hektare sebagaimana disyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk wilayah dengan volume sampah besar (Sholikhah, 2023). Akibatnya, terjadi kondisi overload, yang tidak hanya mencemari lingkungan sekitar melalui rembesan lindi ke sungai dan lahan pertanian, tetapi juga menimbulkan protes sosial seperti blokade jalan oleh warga Desa Mrican (Pebrianti, 2023; detik.com, 2023).

Pengelolaan sampah yang tidak optimal memiliki dampak luas. Menurut Agustina et. al. (2017), tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pencemaran tanah, air, dan udara, serta meningkatkan risiko penyakit melalui vektor seperti serangga dan tikus. Bahkan, limbah domestik berbahaya berpotensi meningkatkan kasus penyakit kulit dan gangguan sistem pernapasan di sekitar TPA. Selain itu, secara ekonomi, sampah yang tidak terkelola akan meningkatkan beban anggaran negara, baik dari sisi biaya kesehatan maupun pemulihan lingkungan (Hadamuan & Tuti, 2022)

Secara kelembagaan, Kabupaten Ponorogo masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah. Hanya sekitar 31,6% dari total pegawai DLH merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan mayoritas staf hanya berpendidikan SMA/SMK (DLH Ponorogo, 2021). Keterbatasan infrastruktur, seperti tidak optimalnya Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) dan belum dimanfaatkannya pipa metan, juga memperparah kondisi. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga kelembagaan dan kolaboratif.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kerjasama antara sektor publik dan swasta menjadi sebuah pendekatan strategis. Skema Public Private Partnership (PPP) menjadi relevan karena memungkinkan pembagian risiko, sumber daya, dan keahlian antara pemerintah dan mitra swasta dalam pengelolaan infrastruktur dan (Toyib & Nugroho, 2018).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menjalin kerja sama dengan PT Reciki Solusi Indonesia untuk menangani pengolahan sampah dengan pendekatan *refuse derived fuel* (RDF), yang mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif (Kominfo Jatim, 2023). Sistem ini sebelumnya terbukti efektif diterapkan di Lamongan dan mampu mengurangi volume residu yang dikirim ke TPA (Eka et al., 2023)

Kemitraan semacam ini bukan hanya menjawab kebutuhan teknis, melainkan juga membuka peluang pembiayaan melalui mekanisme *Project Development Facility* (PDF) yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Nota Keuangan 2022 secara eksplisit menyebut bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu sektor prioritas dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Sutana, n.d.). Skema ini penting untuk memastikan layanan pengelolaan sampah yang memadai, dan bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik.

Pendekatan teoritik yang digunakan dalam analisis ini mengacu pada konsep *hollow state* dari Provan dan Milward (1994), yang menyatakan bahwa negara modern dapat mengontraksikan berbagai fungsi layanan publik kepada pihak ketiga dengan tetap menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan layanan. Fokusnya berada pada tiga komponen utama, yakni mekanisme kerja sama, struktur pengelolaan, dan insentif yang memotivasi kinerja kedua belah pihak (Sulfiani, 2020)

Dalam kasus Ponorogo, mekanisme kontrak kerja sama antara pemerintah dan PT Reciki, struktur operasional di DLH serta insentif finansial dalam bentuk anggaran dan PDF menjadi aspek kunci yang menentukan keberhasilan pengelolaan TPA Mrican. Penelitian ini menggali dinamika kerja sama tersebut, bagaimana peran aktor-aktor publik dan swasta terlibat, serta apa tantangan dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelusuran data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta observasi lapangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan sampah, khususnya di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk

menggambarkan secara mendalam dinamika penerapan Public Private Partnership (PPP) dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna dan relasi sosial yang terbentuk antara aktor publik dan swasta dalam konteks pengelolaan lingkungan (Moleong, 2010). Penelitian dilakukan secara alamiah dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dari berbagai sumber. Lokasi penelitian difokuskan di TPA Mrican dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo, mengingat kedua institusi ini menjadi sentral dalam pengelolaan sampah serta implementasi skema PPP dengan PT Reciki Solusi Indonesia. Informan ditentukan secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proyek, seperti pejabat DLH, Sekda, dan perwakilan PT Reciki (Sulfiani, 2020).

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014) yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori untuk memastikan keandalan hasil penelitian (Moleong, 2021). Fokus kajian diarahkan pada tiga dimensi utama menurut teori Provan dan Milward (1994) dalam Sulfiani (2020), yaitu mekanisme (pembayaran, kontrak, evaluasi), struktur (peran aktor), dan insentif (fasilitas yang diberikan pemerintah kepada mitra swasta). Keseluruhan proses penelitian dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik kolaborasi pemerintah-swasta dalam pengelolaan persampahan serta implikasinya terhadap efektivitas layanan publik di tingkat daerah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan PT Reciki Solusi Indonesia dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun telah dilakukan penandatanganan MoU dan koordinasi awal, namun implementasi teknis pengelolaan sampah berbasis RDF belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, termasuk minimnya kesiapan infrastruktur, kurangnya

keselarasan dalam pembagian peran, dan tantangan koordinasi lintas sektor.

Untuk menggambarkan situasi tersebut, berikut disajikan ringkasan hasil wawancara dengan pihak-pihak kunci dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Ringkasan Hasil Wawancara

Aspek Pengelolaan	Temuan Utama
Mekanisme Kerja Sama	MoU sudah ditandatangani oleh kedua pihak
Struktur Peran Aktor	DLH Ponorogo masih menjadi pelaksana utama; pihak swasta belum sepenuhnya beroperasi.
Kendala Implementasi	Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia;
Insentif dan Pembiayaan	Belum adanya skema pembiayaan khusus dari APBD atau PDF untuk mendukung kerja sama.

#### B. Pembahasan

##### 1. Dimensi Mekanisme

Pembentukan kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican merupakan respons terhadap tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menangani limbah padat. Metode open dumping yang selama ini diterapkan berdampak buruk terhadap lingkungan, menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, inisiatif kerja sama ini hadir sebagai solusi inovatif yang menggabungkan sumber daya pemerintah dan kompetensi manajerial pihak swasta. Hal ini sejalan dengan konsep *hollow state* yang dikemukakan oleh Milward & Provan (2000), di mana negara mendesentralisasi layanan publik kepada pihak ketiga, untuk mencapai efisiensi layanan tanpa harus memperluas birokrasi.

Kolaborasi antara Pemkab Ponorogo dan pihak swasta (PT BES, PT Reciki, PT Resinergi) menunjukkan adanya upaya sinergis dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis teknologi modern. Model ini menyerupai skema di TPA Putri Cempo, Surakarta, dan TPA Tamangapa, Makassar, yang berhasil mengurangi volume sampah serta menciptakan manfaat lingkungan dan sosial. Lebih dari itu, pendekatan ini juga mencerminkan semangat New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, orientasi hasil, dan profesiona-

lisme dalam penyelenggaraan layanan publik.

a) Mekanisme Pembiayaan

Dalam konteks TPA Mrican, seluruh pembiayaan investasi awal dan operasional sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta. Pemerintah daerah hanya berkontribusi dalam bentuk pembayaran tipping fee sebesar Rp170.000 per ton yang dihitung berdasarkan tonase melalui jembatan timbang. Skema ini meminimalkan beban fiskal pemerintah sambil tetap memastikan kelangsungan layanan pengelolaan sampah.

Kemitraan seperti ini juga diterapkan di kota lain. Misalnya, studi April et al. (2024) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa mekanisme tipping fee mampu memperjelas tanggung jawab antara aktor, walaupun terdapat kendala administratif. Sementara itu, Saputra (2017) mencatat bahwa skema pembiayaan serupa di Kota Batam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi anggaran. Dalam praktiknya, Pemkab Ponorogo melalui DLH tetap melakukan pengawasan dan penyaluran dana tipping fee sebagai bentuk insentif fiskal.

b) Mekanisme Penentuan Kontrak

Proses kerja sama di TPA Mrican diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), lalu penandatanganan MoU antara pemerintah dan mitra swasta. Kontrak tersebut berdurasi lima tahun dan diperkuat melalui regulasi daerah seperti Perda No. 6 Tahun 2021. Hasil wawancara dengan DLH dan PT Reciki menunjukkan bahwa kontrak ini menjadi dasar operasional dalam pengelolaan sampah sehari-hari.

Dalam konteks internasional, model seperti ini lazim ditemui. Penelitian Suryanto et al. (2024) tentang proyek PSEL Surakarta juga menekankan pentingnya perjanjian tertulis dan pembagian risiko yang proporsional untuk keberhasilan jangka panjang. Di TPA Mrican, meskipun regulasi dan kontrak telah tersedia, masih diperlukan peningkatan aspek pengawasan serta penyempurnaan klausul kontraktual, sebagaimana disarankan oleh Kurniawan & Setyobudi (2014).

c) Mekanisme Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara bertahap, mulai dari skala harian oleh kepala kerja dan DLH, hingga pertemuan bulanan yang bersifat lintas pemangku kepentingan. Meskipun sempat rutin dilakukan sebelum TPST beroperasi, saat ini evaluasi lebih banyak dilakukan melalui laporan tertulis. Padahal, dialog dan forum langsung masih dibutuhkan untuk membahas persoalan teknis seperti kekurangan SDM dan keterbatasan mesin.

Evaluasi semacam ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola modern. Studi Ali & Umar (2024) di TPST Mekarsari dan Kartika & Puspikawati (2021) di Banyuwangi menegaskan pentingnya evaluasi partisipatif untuk membangun kepercayaan dan peningkatan kualitas layanan. Dengan pelatihan SDM dan sistem pelaporan yang transparan, evaluasi dapat menjadi instrumen penting dalam perbaikan berkelanjutan.

2. Dimensi Struktur

Struktur kelembagaan kerja sama di TPA Mrican menampilkan pembagian peran yang cukup jelas: DLH sebagai regulator dan pengawas, sementara PT Reciki dan mitra swasta lain bertanggung jawab atas teknis pengelolaan. Pembagian ini memungkinkan setiap aktor berfokus pada kompetensinya masing-masing. Namun demikian, beberapa temuan menunjukkan perlunya perbaikan dalam koordinasi operasional, terutama pada aspek manajemen tenaga kerja dan efisiensi mesin.

Penelitian Marlina (2020) di TPST Keboansikep dan Wira Saputra (2014) di Kota Bandung menggarisbawahi pentingnya dukungan fasilitas, SDM, dan dana untuk memperkuat struktur kelembagaan. Di TPA Mrican, partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan. Purnomo (2021) menemukan bahwa warga lebih memilih memilah sampah secara mandiri karena fleksibilitas waktu dan insentif ekonomi langsung.

Strategi peningkatan efektivitas struktur dapat dilakukan melalui pelatihan SDM, penguatan sarana, serta penyesuaian kebijakan kerja agar sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi lokal (Kamore

et al., 2024). Pendekatan partisipatif ini akan memperkuat hubungan antar aktor dan mendukung tujuan keberlanjutan.

### 3. Dimensi Insentif

Insentif utama dalam skema kerja sama ini berupa tipping fee yang dibayarkan secara rutin kepada pihak swasta berdasarkan jumlah tonase sampah yang dikelola. Selain itu, pihak swasta berhak atas hasil olahan seperti RDF, kompos, atau produk daur ulang, sementara pemerintah hanya memperoleh output berupa pupuk organik.

Studi Kurniawan (2016) menegaskan bahwa tipping fee dapat menjadi solusi fiskal bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran namun tetap ingin mendorong layanan pengelolaan sampah. Nahrudin (2016) juga menambahkan bahwa insentif ini mampu menarik mitra swasta sekaligus menjaga kualitas layanan.

Namun demikian, keberhasilan insentif sangat bergantung pada kejelasan kontrak, pembagian peran, dan kesinambungan kebijakan. April et al. (2024) mencatat bahwa kegagalan dalam pelimpahan kewenangan dan kurangnya edukasi publik dapat memicu munculnya TPS ilegal. Oleh karena itu, keberhasilan insentif harus ditopang oleh tata kelola yang solid dan kesadaran publik yang terus dibangun melalui edukasi dan pelibatan aktif.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Public Private Partnership (PPP) dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo telah berjalan sesuai dengan kerangka teori *Hollow State* dari Provan dan Milward yang mencakup tiga dimensi utama: mekanisme, struktur, dan insentif. Dimensi mekanisme meliputi pembiayaan melalui sistem tipping fee, penentuan kontrak yang disusun secara legal dan terstruktur, serta evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah dan mitra swasta. Ketiga elemen ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi dalam pengelolaan sampah. Dimensi struktur juga berjalan optimal dengan adanya koordinasi antara pemerintah, swasta, dan tenaga kerja, meskipun masih terdapat tantangan terkait partisipasi masyarakat dan efisiensi sumber daya

manusia. Sementara itu, dimensi insentif menunjukkan bahwa pemberian tipping fee oleh pemerintah menjadi faktor pendorong utama dalam menjaga keberlangsungan operasional dan efektivitas pengelolaan sampah, meskipun evaluasi terhadap dampak jangka panjangnya masih diperlukan.

### B. Saran

Berdasarkan dari temuan penelitian, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo terus memperkuat keberlanjutan dan efisiensi dari model PPP yang telah diterapkan. Pada dimensi mekanisme, penting untuk menjaga konsistensi penerapan tipping fee dan memperkuat sistem evaluasi dengan pelibatan semua pemangku kepentingan. Dimensi struktur dapat ditingkatkan melalui pelatihan tenaga kerja lokal dan penguatan koordinasi kelembagaan. Sementara pada dimensi insentif, perlu dirancang skema penghargaan non-finansial bagi mitra swasta guna meningkatkan motivasi dan kualitas pengelolaan. Ke depan, inovasi teknologi dan replikasi model PPP ke wilayah lain juga sangat disarankan agar sistem pengelolaan sampah menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan secara menyeluruh.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, N., Irianty, H., & Wahyudi, N. T. (2017). Hubungan Karakteristik Petugas Kebersihan Dengan Pengelolaan Sampah Di Puskesmas Kota Banjarbaru. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 4(2), 66-74. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpkmi.v4i2.3843>
- Annur, C. M. (2023). *10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan-2023>
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jawa), 2021-2023*. <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-provinsi-jawa-timur.html>

- Eka, N., Setiawandari, P., & Kriswibowo. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance in Waste Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149–155.
- Hadamuan, M. T., & Tuti, R. W. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 7–14. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4504>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sholikhah, R. N. (2023). *TPA Ponorogo Overload, Setiap Hari 90 Ton Sampah Masuk*. <https://jatim.solopos.com/>.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2022). *Timbulan Sampah di Kabupaten Ponorogo*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>
- Sulfiani, A. N. (2020). Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di RSUD Sawerigading Kota Palopo. *Jurnal I La Galigo*, 3(1), 48–56.
- Sutana, I. W. (n.d.). *Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Indonesia. Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1114-1275/umum/kajian-opini-publik/optimalisasi-pengelolaan-sampah-di-indonesia>
- Toyib, Y., & Nugroho, R. (2018). *Transformasi Public Private Partnership Indonesia*. Elex Media Komputindo.